BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kualitatif deskriptif menggunakan model evaluasi kebijakan publik *Input-Process-Output-Outcome* dari William N. Dunn, implementasi kebijakan penguatan moderasi beragama di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar (BLAM) secara umum telah berjalan dengan sangat efektif. Kebijakan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2020–2024 serta Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 berhasil diterjemahkan oleh Balai Litbang Agama Makassar ke dalam bentuk program diseminasi yang aktif dan inklusif. Proses pembelajaran interaktif, dialogis, dan partisipatif yang diselenggarakan sepanjang tahun 2025 terbukti sukses menghasilkan *outcome* berupa transformasi pemahaman, pengikisan stereotip, serta perubahan sikap kualitatif nyata pada diri para alumni dalam menerapkan empat indikator utama moderasi beragama. Temuan riset kualitatif ini menunjukkan adanya korelasi logis yang sangat kuat antara intensitas durasi waktu pembelajaran (jam pelajaran) dengan kedalaman internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di lapangan.

Evaluasi kebijakan secara kritis menemukan adanya disparitas kinerja kualitatif (*outcome*) di antara empat objek kegiatan yang dievaluasi, di mana program Sekolah Penguatan Moderasi Beragama (Sekolah PMB) tampil sebagai program paling unggul dengan skor rill sebesar 3.50 (Sangat

Efektif). Melalui durasi yang sangat padat selama 48 JP (2.880 menit), program ini terbukti sukses memperkuat aspek komitmen kebangsaan dan toleransi secara mendalam. Temuan empiris menunjukkan bahwa Sekolah PMB mampu mencetak agen perubahan (*agents of change*) yang melakukan aksi sosial-keagamaan nyata di level komunal-struktural, seperti inisiatif alumni mendirikan forum dialog lintas iman mandiri Kristen-Islam bernama *"BISA"* di STFT INTIM Makassar, mendirikan *Komunitas Oase Cendekia*, serta mengadvokasi hak ibadah kelompok minoritas. Namun, permasalahan struktural paling kritis pada Sekolah PMB terletak pada kemandekan Rencana Tindak Lanjut (RTL) pasca-pelatihan. Akibat nihilnya alokasi anggaran khusus dari pihak Balai untuk melakukan pemantauan (*post-program monitoring*) dan pendampingan terstruktur (*follow-up*), draf komitmen aksi sosial yang disusun oleh alumni di kelas sering kali berakhir sebagai tumpukan dokumen administratif saja.

Selanjutnya, program Klinik Moderasi Beragama (Klinik MB) yang diselenggarakan dengan durasi 3 JP juga menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dengan raihan skor rill sebesar 3.25 (Sangat Efektif). Program ini terbukti sangat kuat dalam memperkuat aspek toleransi aktif dan sikap anti-kekerasan di tingkat akar rumput (*grassroots*). Melalui inovasi diagnosis masalah keagamaan secara digital (layanan *Halo MB* atau *Klinik MB*) sebelum kelas dimulai, program ini sangat efektif meruntuhkan dinding pembatas psikologis peserta yang semula berpandangan ekstrem dan eksklusif menjadi berbalik bersikap ramah, berempati, serta ikut melindungi kaum minoritas di lingkungannya. Meskipun demikian, permasalahan

utama Klinik MB terletak pada tingginya ketergantungan terhadap infrastruktur digital pendukung. Hal ini membentur kendala berupa kesenjangan (*gap*) literasi teknologi serta keterbatasan akses internet di tingkat masyarakat perdesaan, ditambah dengan belum adanya mekanisme pengawasan komitmen jangka panjang bagi alumni klinik.

Sementara itu, program *Visiting Class* dan *Moving Class* yang masing-masing diselenggarakan dengan durasi singkat selama 2 JP menunjukkan kinerja kualitatif yang lebih rendah, dengan raihan skor rill masing-masing sebesar 3.00 (Efektif) dan 2.75 (Cukup Efektif). Pada program *Visiting Class*, aspek toleransi dan komitmen kebangsaan mahasiswa berhasil diperkuat secara kognitif melalui dialog lintas iman di kampus, namun gagal merangsang aksi nyata alumni dalam melakukan advokasi sosial atau melestarikan budaya lokal secara aktif di luar kelas. Adapun pada program *Moving Class*, keterbatasan alokasi waktu yang ekstrem (hanya 90 menit) memicu terjadinya "paradoks kognitif-praktik" pada diri para pelajar. Siswa memahami nilai-nilai persatuan secara teoretis, namun bersikap pasif dan gagal bertransformasi menjadi tindakan fisik nyata dalam melestarikan tradisi budaya lokal keagamaan di sekolah mereka. Permasalahan mendasar dari kedua program durasi pendek ini adalah format kegiatannya yang bersifat sekali selesai (*one-off event*) tanpa ditopang oleh sistem pendampingan berkelanjutan, sehingga energi kepeloporan sosial peserta padam begitu saja setelah kelas ditutup.

Pada akhirnya, analisis evaluasi kebijakan ini menyimpulkan bahwa akar permasalahan utama dari mandeknya RTL Sekolah PMB dan

rendahnya kinerja *outcome* pada program lainnya disebabkan oleh fragmentasi anggaran BLAM. Alokasi keuangan DIPA BLAM habis terbagi secara merata untuk mendanai kegiatan-kegiatan sosialisasi jangka pendek yang kurang berkelanjutan. Temuan ini secara logis menuntut adanya tindakan reformasi kebijakan berupa pengalihan dan pemusatan anggaran (*budget pooling*) dari program-program berdurasi pendek (Klinik, *Visiting*, dan *Moving Class*) secara terfokus untuk mendanai sistem pengawasan, bimbingan, serta pendampingan kelanjutan RTL Sekolah PMB secara berkelanjutan di tengah masyarakat melalui pelembagaan wadah alumni yang formal.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan.

1. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar direkomendasikan untuk menyusun dan mengimplementasikan draf rekomendasi taktis di dalam *Policy Brief* hasil formulasi penelitian ini, yang menitikberatkan pada keputusan mempertahankan program unggulan Sekolah PMB sekaligus menghapus tiga kegiatan diseminasi sisanya (Klinik MB, *Visiting Class*, dan *Moving Class*). Keputusan mempertahankan Sekolah PMB didasarkan pada capaian kinerja *outcome* kualitatif tertinggi (Skor Rerata: 3.50) melalui durasi padat 48 JP yang terbukti sukses mencetak agen perubahan sosial nyata. Sebaliknya, penghapusan (*policy*

termination) terhadap Klinik MB (Skor Rerata: 3.25), *Visiting Class* (Skor Rerata: 3.00), dan *Moving Class* (Skor Rerata: 2.75) mendesak dilakukan karena durasi minimalis (2-3 JP) ketiga program sekali-selesai (*one-off event*) tersebut terbukti kurang efektif mengubah perilaku budaya aktif alumni serta mengakibatkan fragmentasi anggaran DIPA organisasi yang tidak efisien.

2. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar direkomendasikan untuk menindaklanjuti draf operasional dalam *Policy Brief* tersebut dengan melakukan pemusatan anggaran (*budget pooling*) guna mengawal keberlanjutan Rencana Tindak Lanjut (RTL) alumni secara terstruktur. Seluruh pagu anggaran hasil penghapusan tiga program jangka pendek di atas perlu dialihkan dan difokuskan secara tunggal untuk membiayai pengawasan, bimbingan, dan pendampingan kelanjutan rencana aksi sosial alumni di lapangan. Salah satu langkah konkret yang direkomendasikan adalah melembagakan secara resmi wadah komunikasi formal bernama Ikatan Alumni Sekolah PMB (Ika-PMB) agar komitmen kepeloporan sosial alumni tidak mengalami kelumpuhan pasca-kegiatan selesai.
3. Kementerian Agama Republik Indonesia bersama para pemangku kepentingan terkait direkomendasikan untuk menjadikan temuan riset evaluatif serta rumusan taktis dalam *Policy Brief* tesis ini sebagai acuan dalam mereformasi kebijakan penguatan moderasi beragama secara makro. Perencana kebijakan di tingkat pusat harus

berani menggeser paradigma lama yang berorientasi pada aspek kuantitas kegiatan administratif (*output*) menjadi berfokus pada kualitas perubahan sikap dan perilaku nyata alumni di lapangan (*outcome*). Reformasi kebijakan ini dapat diakselerasi dengan menerapkan model konsolidasi fiskal yang ditawarkan *dalam Policy Brief* sebagai instrumen penggunaan dana negara yang efisien.

4. Bagi peneliti akademis berikutnya, disarankan untuk menjadikan hasil penelitian serta analisis taktis di dalam *Policy Brief* ini sebagai referensi dasar untuk memperluas cakupan studi evaluasi kebijakan moderasi beragama. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan model evaluasi kebijakan lainnya atau mengkaji dimensi yang lebih spesifik mengenai dampak ekonomi-politik dari penerapan langkah terminasi kebijakan (*policy termination*) serta pemusatan anggaran (*budget pooling*) pada instansi pemerintah, guna mengukur tingkat efisiensi fiskal serta keberlanjutan dampak jangka panjang (*impact*) program secara lebih komprehensif di tengah masyarakat.

C. Produk Tesis

Sebagai bentuk luaran konkret yang memiliki nilai guna praktis (*applied value*) dari hasil evaluasi kebijakan ini, disusun sebuah produk terapan (*applied policy product*) berupa naskah kebijakan (*Policy Brief*) dengan judul "Reformasi Kebijakan Moderasi Beragama: Eskalasi Sekolah PMB sebagai Flagship Nasional dan Konsolidasi Fiskal".

Naskah kebijakan ini dirancang secara khusus untuk memberikan rekomendasi solutif dan aplikatif kepada Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama RI selaku pengambil keputusan makro, melalui penyajian tiga pilihan alternatif kebijakan sebagai berikut:

1. ***Up-Scaling* Sekolah PMB Menjadi Model Kurikulum Standar Nasional Kementerian Agama**

   Menaikkan kedudukan Sekolah PMB menjadi Model Kurikulum Standardisasi Nasional di lingkungan Balai Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) serta Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, mengingat kurikulum intensif 48 JP terbukti secara ilmiah paling efektif menghasilkan *outcome* kepeloporan sosial yang nyata (Skor rill: 3.50).

2. **Implementasi *Policy termination* Terhadap 3 Program Pendek dan Konsolidasi Anggaran secara Total (100% *Budget pooling*)**

   Melakukan penghentian secara permanen (*policy termination*) terhadap tiga program berdurasi pendek sekali selesai (*one-off event*), yaitu Klinik MB (Skor rill: 3.25), *Visiting Class* (Skor rill: 3.00), dan *Moving Class* (Skor rill: 2.75) yang dinilai tidak efisien. Seluruh anggaran DIPA dialihkan secara terpusat (*100% budget pooling*) untuk membiayai pengawasan berkala RTL Sekolah PMB secara berkelanjutan.

3. **Pelembagaan Ekosistem Pasca-Pelatihan Melalui Jejaring Alumni Formal "Ika-PMB"**

   Mendirikan dan melembagakan wadah komunikasi formal bernama Ikatan Alumni Sekolah PMB (Ika-PMB**)** sebagai infrastruktur sosiologis yang memfasilitasi pemantauan berkala dan pendampingan lapangan agar komitmen aksi sosial alumni tetap terjaga secara berkesinambungan.

Secara keseluruhan, formulasi ketiga rekomendasi taktis ini berhasil mentransformasikan hasil evaluasi akademis ke dalam keputusan operasional birokrasi. Melalui kombinasi berani antara terminasi program tidak efektif dan konsolidasi fiskal secara terfokus, Kementerian Agama RI dapat mewujudkan efisiensi anggaran negara sekaligus melahirkan keberlanjutan dampak perilaku moderasi beragama secara nyata di tengah masyarakat.